

**PENGARUH DANA PERIMBANGAN DAN BELANJA DAERAH TERHADAP
KINERJA KEUANGAN DAERAH PADA
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI
SUMATERA SELATAN**

SKRIPSI



**Nama : Rahmi Syafitri
Nim : 222018264**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2022**

**PENGARUH DANA PERIMBANGAN DAN BELANJA DAERAH TERHADAP
KINERJA KEUANGAN DAERAH PADA
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI
SUMATERA SELATAN**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**



**Nama : Rahmi Syafitri
Nim : 222018264**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2022**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rahmi Syafitri
NIM : 222018264
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Judul Skripsi : Pengaruh Dana Perimbangan dan belanja daerah terhadap pertumbuhan kinerja keuangan daerah pada Kabupaten/Kota Sumatera Selatan.

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik Sarjana Strata satu baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam data ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini serta sanksi lainnya dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Palembang, Agustus 2022



Rahmi Syafitri

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Pengaruh Dana Perimbangan Dan Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan
Nama : Rahmi Syafitri
Nim : 222018264
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal, Agustus 2022

Pembimbing I,



Welly, S.E., M.Si
NIDN: 0212128102

Pembimbing II,



Anggreli Afrida, S.E., M.Si
NIDN: 021808403

Mengetahui,
Dekan
u.b. Ketua Program Studi Akuntansi



Dr. Refli Sya'uddin, S.E., Ak.M.Si.CA
NIDN/NBM:0216106902/944806

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

Jangan pernah membuat keputusan saat marah

Dan jangan pernah berjanji saat kau bahagia

(Ali bin Abi Thalib)

Kesempatan bukanlah hal yang kebetulan, kau harus menciptakannya

(Chris Grosser)

Terucap Syukur kepada Allah SWT

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

- ❖ Kedua Orang Tuaku tercinta ayahku (Dedi Muna) dan Ibukku (Leni Marlina) yang selalu mendoakan dan memotivasi serta memberi semangat kepadaku
- ❖ Saudara kandungku yang telah memberi semangat
- ❖ Dosen pembimbingku yang telah membantu dan memberi semangat
- ❖ Almamater

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PRAKATA

~Bismillahirrahmanirrahim~

Assalamualaikum Wr, wb.

Alhamdulillahirobbil alamin, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini yang berjudul “**Pengaruh Dana Perimbangan dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan**”.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua saya tercinta, Bapak Dedi Muna dan Ibu Leni Marlina dan Kakak Bra Sabna Putri Deni dan Adik-Adik Saya M.Deden Putra Deni dan Haddiyul Ahdan Fathul Deni serta seluruh keluarga besar yang selalu mendo’akan, memberikan motivasi dan inspirasi agar selalu menjadi pribadi yang tidak mudah menyerah sehingga penulisan usulan penelitian ini dapat diselesaikan. Penulis juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pembimbing saya Ibu Welly,S.E.,M.Si dan Ibu Anggrelia Afrida,S.E.,M.Si yang telah sabar membimbing dan memberikan pengarahan serta saran-saran yang tulus dan ikhlas dalam menyelesaikan penelitian menjadi lebih baik lagi. Selain itu ucapan terimakasih juga penulis kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli,SE., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta wakil-wakil Rektor beserta staf karyawan/karyawati Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Yudha Mahrom DS,SE.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf.
3. Bapak Dr. Betri, SE.,AK.,M.Si.,CA dan Ibu Nina Sabrina, SE.,M.Si selaku ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Welly, S.E.,M.Sidan Ibu Anggrelia Afrida, S.E.,M.Si selaku pembimbing skripsi
5. Ibu Fenty Astrina, S.E.,M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Bapak/Ibu dan Staf Pegawai Kantor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Provinsi Sumatera Selatan.
7. Sahabat saya Miftahul Khaira dan seluruh teman program studi akuntansi angkatan 2018

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih banyak kesalahan dan kekurangan.Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca dan berbagai pihak demi kesempurnaan penelitian ini, atas perhatian dan masukan saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikumWr.Wb

Palembang, Agustus 2022

Rahmi Syafitri

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
PRAKATA	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A Latar Belakang Masalah.....	1
B Rumusan Masalah	8
C Tujuan Penelitian	8
D Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN	
HIPOTESIS	10
A KAJIAN PUSTAKA	10
1 Landasan Teori	10
a Dana Perimbangan.....	10

b	Belanja Daerah.....	12
c	Kinerja Keuangan Daerah.....	14
2	Penelitian Sebelumnya	20
B	Kerangka Pemikiran.....	23
C	Hipotesis.....	25
BAB III METODE PENELITIAN		26
A	Jenis Penelitian	26
B	Lokasi Penelitian	27
C	Operasionalisasi Penelitian	27
D	Populasi dan Sampel	28
E	Data yang Diperlukan	29
F	Metode Pengumpulan Data.....	30
G	Analisis Data dan Teknik Analisis	32
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		42
A.	Hasil Penelitian	42
1.	Sejarah Singkat Provinsi Sumatera Selatan.....	42
2.	Letak Geografis dan batas-batas wilayah Provinsi Sumatera Selatan...43	
3.	Analisis Data	45
a.	Statistik Deskriptif.....	46
b.	Uji Asumsi Klasik	47
1.)	Uji Normalitas	47
2.)	Uji Multikolinearitas	48
3.)	Uji Heteroskedastisitas	49

4.) Uji Autokorelasi	50
c. Uji Hipotesis	51
1) Hasil Analisis Regresi Berganda	51
2) Hasil Uji Koefisien Determinasi	52
3) Uji Simultan (uji f)	53
4) Uji Parsial (uji t)	54
B. Pembahasan Hasil Penelitian	56
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Data realisasi Dana Perimbangan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2021	5
Tabel II.1	Pola hubungan kemandirian dan kemampuan keuangan Daerah	16
Tabel II.2	Pedoman penilaian dan kinerja efektivitas terhadap PAD.....	18
Tabel II.3	Pedoman penilaian dan kinerja efisiensi.....	19
Tabel II.4	Pedoman penilaian keserasian belanja.....	20
Tabel II.5	Persamaan dan perbedaan penelitian dengan penelitian sebelumnya	22
Tabel III.1	Operasionalisasi Variabel	27
Tabel III.2	Prosedur Penarikan Sampel	29
Tabel IV.1	Gambaran Jawaban Hasil Pengolahan Data	44
Tabel IV.2	Hasil Pengujian Analisis Statistik Deskriptif.....	46
Tabel IV.3	Hasil Uji Multikolinearitas	48
Tabel IV.4	Hasil Uji Autokorelasi	50
Tabel IV.5	Hasil Uji Regresi Berganda	51
Tabel IV.6	Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	52
Tabel IV.7	Hasil Uji F (Simultan).....	53
Tabel IV.8	Hasil Uji T (Parsial).....	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Pemikiran	24
Gambar IV.1 Hasil Uji Normalitas	47
Gambar IV.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	49

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Data Realisasi Dana Perimbangan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2021
- Lampiran 2 : Hasil Pengolahan Data Dana Perimbangan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2021
- Lampiran 3 : Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi
- Lampiran 4 : Surat Keterangan Selesai Riset dari Tempat Penelitian
- Lampiran 5 : Sertifikat Pengantar Aplikasi Komputer
- Lampiran 6 : Sertifikat Komputer Akuntansi
- Lampiran 7 : Sertifikat Membaca dan Menghafal Al-Quran
- Lampiran 8 : Sertifikat Pelantikan SPSS
- Lampiran 9 : Sertifikat Workshop
- Lampiran 10 : Plagirism Checker
- Lampiran 11 : Biodata Penulis

ABSTRAK

Rahmi Syafitri, 2022, “Pengaruh Dana Perimbangan dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Dana Perimbangan dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif. Data yang diolah adalah data sekunder dari Jumlah Dana Perimbangan, Belanja Daerah tahun 2018-2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan Dana Perimbangan dan Belanja Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Secara parsial Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan dan Belanja Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Daerah di Provinsi Sumatera Selatan.

Kata Kunci: Dana Perimbangan, Belanja Daerah, Kinerja Keuangan Daerah

ABSTRACT

Rahmi Syafitri, 2022, "The Effect of Balancing Funds and Regional Expenditures on Regional Financial Performance in Regencies/Cities in South Sumatra Province".

This study aims to determine the effect of balancing funds and regional financial performance in regencies/cities in the province of South Sumatra. The type of research used in this research is associative research. The data processed is secondary data from the Amount of Balancing Funds, Regional Expenditures for 2018-2021. The result of this research shows that simultaneously the Balancing Fund and Regional Expenditure have a positive effect on regional Financial Performance in Regencies/Cities in South Sumatra Province. Partially, the Balancing Fund has a negative effect on Regional Financial Performance in Regencies/Cities in South Sumatra Province and Regional Expenditures have a positive effect on Regional Financial Performance in South Sumatra Province.

Keyword: *Balancing Fund, Regional Expenditures, Regional Financial Performance*

No	NAMA	NIM	KETERANGAN
1.	Rahmi Syafitri	222018264	

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang terdiri atas berbagai atas berbagai wilayah, baik pulau, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa. Dalam penyelenggaraan perekonomian, setiap wilayah diberi wewenang sendiri untuk mengelola karena Indonesia menganut asas desentralisasi adanya Otonomi Daerah yang mulai resmi diberlakukan pada 1 Januari 2001. Pola-pola yang lama penyelenggaraan pemerintah tidak sesuai lagi bagi tahanan rakyat yang sudah berubah, terlebih lagi setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah direvisi menjadi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah.

Sumber pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Penyerahan urusan dan pemberian sumber pendanaan dalam bentuk kebijakan perimbangan keuangan pada daerah guna mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat di daerah. Serta lebih luas di harapkan berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan ekonomi daerah.

Berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah telah membawa perubahan yang mendasar pada sistem dan mekanisme pengelolaan keuangan daerah. Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Di samping Dana Perimbangan tersebut pemerintah daerah mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah, Pembiayaan, dan Lain-lain.

Rukmana (2013 :2) Adapun salah satu kriteria yang menunjukkan bahwa suatu daerah otonomi yaitu terletak pada kemampuan keuangan daerah. Maka daerah otonomi harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber daya keuangannya sendiri, sehingga pemerintah daerah harus mampu menimalkannya ketergantungan kepada pemerintah pusat. Perimbangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dapat dikatakan ideal apabila tingkat pemerintah dapat mengatur keuangannya untuk membiayai tugas wewenang daerahnya masing-masing.

Baldric Siregar (2015 :31) belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dari periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja daerah jika dilihat dari banyaknya jumlah penduduk disuatu daerah, maka jumlah penduduk yang ada semakin besar tentunya akan memerlukan anggaran yang besar pula. Meningkatnya jumlah penduduk berbanding lurus dengan adanya

peningkatan saran dan prasarana umum, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Dengan adanya ini, tentu berdampak terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Mardiasmo (2009) mengatakan bahwa kinerja keuangan adalah satu ukuran yang dapat digunakan untuk memastikan kemampuan daerah dalam melaksanakan aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar untuk mempertahankan layanan yang diinginkan dimana penilaian yang lebih tinggi menjadi tuntutan yang harus dipenuhi agar pihak eksternal memutuskan untuk berinvestasi di dalam daerah. Pengukuran kinerja yang bersumber dari informasi finansial seperti laporan keuangan, diukur berdasarkan pada anggaran yang telah dibuat.

kinerja keuangan yang diukur menggunakan rasio efisiensi dari hasil belanja daerah di pendapatan. Kinerja keuangan dikatakan sangat efisien apabila rasio efisiensi kurang dari 60%, efisien berada pada presentase 60%-80%, cukup efisien berada pada presentase 80%-90%, kurang efisien berada pada presentase 90%-100%, tidak efisien berada pada presentase 100% ke atas.

Rivai dan Basri (2017:138), Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran maupun kinerja yang telah ditentukan dahulu telah disepakati bersama.

Pemberian dana perimbangan ke pemerintah daerah diharapkan dapat mewujudkan adanya otonomi daerah sesuai dengan perundangan. Dana perimbangan yang diberikan ke pemerintah daerah diharapkan dapat menumbuhkan perekonomian di daerah. Dan secara bertahap pemerintah daerah dapat mandiri dan menutup pengeluarannya dengan Pendapatan Asli Daerah. Namun, dalam kenyataan hal ini belum bisa terlaksanakan setelah dua puluh tahun desentralisasi fiskal. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam situs ekonomi.bisnis.com dan www.ssas.co.id.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Rian Nastiti (2018) PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Sealys Harie saputri (2020) Dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Budianto (2017) Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Ade Pipit dan Oktaviani (2019) Dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Aulia Rizka Kusuma dan Nur (2017) meneliti tentang Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Efisiensi Kinerja Keuangan Pemeintah Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja daerah berpengaruh terhadap efisiensi kinerja keuangan pemerintah daerah.

Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah yang menjadi dasar dalam penerapan pengelolaan kinerja keuangan bagi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Provinsi Sumatera Selatan dapat terlaksana sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri maka Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Sumatera Selatan. Keberhasilan suatu daerah tidak lepas dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik.

Berikut adalah data realisasi dana perimbangan dan belanja daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019-2021

Tabel 1.1
Data Realisasi Dana Perimbangan dan Belanja Daerah pada
Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2021

Kota /Kabupaten	Tahun	Dana Perimbangan	Belanja Daerah	Kinerja keuangan Daerah
Kab. Banyuasin	2018	2.080.649.009.995	1.992.040.769.575	95,74
	2019	2.449.783.048.210	2.424.700.452.132	98,97
	2020	2.224.006.629.416	2.110.704.826.963	94,90
	2021	2.285.916.391.687	2.332.836.297.622	102,05
Kota Palembang	2018	3.485.882.634.349	3.488.244.426.631	100,06
	2019	3.987.546.941.588	3.968.206.721.208	99,51
	2020	3.684.819.109.880	3.699.142.153.604	100,38
	2021	3.690.804.007.361	3.547.200.752.517	96,10
Kab. Empat Lawang	2018	978.617.329.498	968.083.615.710	98,92
	2019	1.057.873.519.762	1.051.261.964.092	99,37
	2020	1.067.660.574.419	1.067.115.274.087	99,94
	2021	1.041.111.083.451	1.147.048.256.792	110,17
Kab. Lahat	2018	1.916.874.000.902	1.834.484.998.040	95,70
	2019	2.276.673.593.299	2.017.843.693.692	88,63
	2020	1.951.242.635.457	2.006.514.768.199	102,83
	2021	2.198.233.319.010	2.112.681.151.755	96,10
Kab. Muara Enim	2018	2.525.583.634.051	2.434.360.114.052	96,38
	2019	3.072.025.276.420	2.992.193.666.802	97,40
	2020	2.460.176.937.889	2.511.881.673.253	102,10

	2021	2.739.438.218.970	2.406.930.642.146	87,86
Kab. Musi Banyuasin	2018	3.019.699.625.935	2.958.060.291.945	97,95
	2019	3.941.909.794.940	3.647.212.439.376	92,44
	2020	3.540.659.694.225	3.337.578.658.890	94,26
	2021	3.510.691.709.632	3.836.457.605.910	109,27
Kab. Musi Rawas	2018	1.703.507.636.928	1.648.414.553.340	96,76
	2019	1.920.259.977.512	1.870.283.441.227	97,39
	2020	1.809.855.136.717	1.881.886.801.295	103,97
	2021	1.939.565.577.829	1.945.941.558.922	100,32
Kab. Musi Rawas Utara	2018	922.981.792.439	867.583.014.235	93,99
	2019	1.018.729.380.075	1.067.473.093.706	104,78
	2020	880.380.326.694	919.133.792.277	104,40
	2021	912.377.681.464	800.698.165.827	87,75
Kab. Ogan Ilir	2018	1.417.185.838.010	1.374.234.887.678	96,97
	2019	1.631.001.559.908	1.573.955.101.490	96,50
	2020	1.509.199.024.692	1.276.406.712.748	84,57
	2021	1.568.453.375.977	1.451.185.122.873	92,52
Kab. Ogan Komering Ilir	2018	2.224.001.831.453	2.304.567.686.432	100,12
	2019	2.471.793.547.800	2.369.154.292.252	95,72
	2020	2.243.104.528.642	2.489.887.093.777	111,01
	2021	2.230.242.154.827	2.367.341.403.316	106,14
Kab. OKU	2018	1.412.521.909.219	1.419.173.692.317	100,47
	2019	1.614.335.215.194	1.544.158.811.036	95,65
	2020	1.385.249.753.331	1.490.566.137.564	107,60
	2021	1.432.186.304.633	1.400.658.217.884	97,79
Kab. OKU Selatan	2018	1.268.126.824.333	1.228.203.115.853	96,85
	2019	1.394.327.301.084	1.437.166.894.082	103,07
	2020	1.362.285.274.507	1.356.759.375.073	99,59
	2021	1.278.699.653.187	1.362.285.274.507	106,53
Kab. OKU Timur	2018	1.627.163.554.867	1.614.913.933.936	99,24
	2019	1.874.516.581.912	1.977.249.387.035	105,48
	2020	1.997.671.003.343	1.900.173.326.953	95,11
	2021	1.925.411.974.490	1.924.036.260.615	99,92
Kab. Pali	2018	1.226.434.373.053	1.359.463.867.999	100,12
	2019	1.525.498.002.718	1.471.170.285.895	96,43
	2020	985.063.694.892	987.174.717.745	100,21
	2021	1.635.357.044.722	1.607.570.077.016	98,30
Kota Lubuk Linggau	2018	923.898.833.425	859.995.202.223	93,08
	2019	1.029.631.473.221	943.561.222.062	91,64
	2020	1.026.932.400.770	1.020.618.531.165	99,38
	2021	955.956.495.192	948.463.242.185	99,21
Kota Pagaralam	2018	769.448.437.267	755.603.214.053	98,20
	2019	841.143.014.868	810.513.323.486	96,35
	2020	856.674.499.675	805.446.528.438	94,02
	2021	753.110.248.125	734.316.797.197	97,50
Kota Prabumulih	2018	958.368.934.099	850.890.467.677	88,78
	2019	1.220.476.081.088	1.146.555.333.892	93,94
	2020	972.242.373.625	1.054.351.935.275	108,44
	2021	1.009.097.781.095	949.041.832.016	94,04

Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan, 2022

Berdasarkan tabel 1.1 terdapat fenomena masalah yang menunjukkan pertumbuhan kinerja keuangan di kabupaten Banyuasin tahun 2021 sebesar 102,05 yang berarti kinerja keuangan di kabupaten Banyuasin tidak efisien karena berada di atas 100%. Terdapat di kota Palembang tahun 2018 dan 2020 kinerja keuangannya 100,06 dan 100,38 menunjukkan tidak efisien. Perbandingan yang sangat jauh antara kabupaten Empat Lawang yang menunjukkan kinerja keuangannya efisien

Berdasarkan tabel diatas kabupaten Musi Rawas selama 2 tahun 2020 sebesar 103,97 tahun 2021 sebesar 100,32 menunjukkan kinerja keuangannya tidak efisien. Selanjutnya kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2020 kinerja keuangannya 104,40 tidak efisien di bandingkan tahun 2021 kinerja keuangannya sebesar 87,75 yang menunjukkan efisien. Fenomena selanjutnya dilihat di kabupaten Ogan Kemering Ilir tahun 2018 kinerja keuangannya sebesar 100,12 tahun 2020 kinerja keuangannya sebesar 111,01 tahun 2021 sebesar 106,14 yang menunjukkan tidak efisien. Selanjutnya kabupaten Oku tahun 2020 kinerja keuangannya sebesar 107,60 yang menunjukan tidak efisien, tetapi tidak dengan kabupaten Oku Selatan yang menunjukkan kinerja keuangannya efisien.

Fenomena selanjutnya terdapat didata kabupaten Oku Timur tahun 2019 sebesar 105,48 yang menunjukkan kinerja keuangannya tidak efisien. Kabupaten Pali tahun 2020 kinerja keuangan sebesar 100,21 tidak efisien berbeda dengan tahun 2019 dan 2021 yang menunjukkan efisien. Selanjutnya

dikota Prabumulih tahun 2020 kinerja keuangan sebesar 108,44 yang menunjukkan data tersebut tidak efisien.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Dana Perimbangan dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah apakah:

1. Bagaimanakah Pengaruh Positif Dana Perimbangan dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Secara bersama-sama?
2. Bagaimanakah Pengaruh Positif Dana Perimbangan terhadap kinerja keuangan daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan secara parsial?
3. Bagaimanakah Pengaruh Positif Belanja Daerah terhadap kinerja keuangan daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan secara parsial?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Pengaruh Positif Dana Perimbangan dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan secara bersama.

2. Untuk Mengetahui Pengaruh Positif Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
3. Untuk Mengetahui Pengaruh Positif Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya :

1. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan dan pemahaman tentang Pengaruh Dana Perimbangan dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Sebagai bahan referensi dan informasi pendukung tentang Pengaruh Dana Perimbangan dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

3. Bagi Almamater

Sebagai referensi keilmuan mengenai penyelenggaraan kinerja daerah khususnya pengaruh Dana Perimbangan dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, sebagai informasi dan dokumentasi data penelitian yang dapat dijadikan referensi perpustakaan untuk penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2012) *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Keempat. Penerbit Salemba Empat. Jakarta
- Abdul Halim.(2017).*Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- Aulia Rizka Kusuma. (2017). *Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap efisiensi kinerja keuangan pemerintah daerah*. Vol.6 No.1
- Baldric Siregar. (2015). *Akuntansi sektor public (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua)*. Cetakan Pertama. Yogyakarta. Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Budianto dan Stanly W alexander. (2016). *Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Kierja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara*. Vol.4 No.4
- Fadillah Amin. (2019) *Penganggaran di Pemerintah Daerah*. Cetakan Pertama. Malang. UB press
- Indah Yuni Astuti. (2021) *Kecerdasan Emosional dan komitmen kerja dalam mempengaruhi kinerja keuangan*. Cetakan Pertama. Bojong. NEM
- Mahmudi, (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Penerbit UUP STIM YKPN, Yogyakarta
- Mahsun, Mohamad. (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik: Cetakan Pertama*. Yogyakarta: Penerbit BPFEE- Yogyakarta
- Mardiasmo.2009.*Akuntansi Sektor Publik*: Yogyakarta: ANDI
- Masdiantini, putu Riesty dan Ni Made Adi Erawati, 2016, *pengaruh ukuran Pemerintah Daerah, Intrgovernmental Revenue, Temuan dan Opini Audit BPK pada Kinerja Keuangan*, E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana,14
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Keuangan Daerah
- Putri, Ni Kadek Novia Indra dan Nova Novita Indrawati dan Ni Putu Ayu Daemayanti. 2019. “*Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di wilayah Sarbagita Provinsi Bali*”. *E-jurnal Manajemen*, Vol.8, No.5

- Phaureula Artha Wulandari. (2018) *Pajak daerah dalam pendapatan asli daerah*. Cetakan Pertama. Sleman. Cv Budi Utama
- R.Neneng Rina Andriani dan Nisa Noor Wahid. (2018). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Studi kasus pada Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2006-2015*.Vol.13 No.1
- Sari.2016. *Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, pad, leverage, Dana Perimbangan dan ukuran legislatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (studi pada kab/kota pulau sumatera)*.faculty of economics Riau Universiy. Pekanbaru. JOM Fekon Vol 3 No 1.
- Sealys Harie Saputri. (2020). *Pengaruh Dana Perimbangan, Belanja Daerah dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah*. Vol.9 No.1
- Slamet Riyanto, S.T., M.M. dan Dr. Aglis Andhika Hatmawan, S.E., M.M (2020) *metode riset penelitian kuantitatif*. Cetakan pertama. Yogyakarta. Deepublish Publisher.
- Sugiyono (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung Alfabet.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Dana Perimbangan
- V. Wiratna Sujarweni, (2019). *Metodelogi Penelitian Bisnis dan Ekonomi Pendekatan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Baru
- V. Wiratna Sujarweni, (2020). *Metodelogi Penelitian Bisnis dan Ekonomi Pendekatan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Baru
- Yoyo Sudaryo, dkk. (2017). *Keuangan di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Penerbit ANDI